

Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat

Pebri Harto^{1*}, Intiyas Utami², Rulyanti Susi Wardhani³

¹Universitas Terbuka

²Universitas Kristen Satya Wacana

³Universitas Bangka Belitung

pebriharto@yahoo.co.id

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 12 Agustus 2022

Disetujui : 26 Agustus 2022

Dipublikasi : 1 Oktober 2022

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Degree of Autonomy/Fiscal Independence in West Bangka Regency and analyze how big the correlation between GRDP and PAD is in West Bangka Regency. This study uses a quantitative approach with data analysis methods and hypothesis testing using panel data regression analysis. The data used in this research is the Regional Finance data of West Bangka Regency and the GRDP of West Bangka Regency in 2011 - 2020. The results of the study show that the value of the Degree of Fiscal Autonomy (DOF) of West Bangka Regency in the period 2011 to 2020 with the category "very less" but despite having a relatively small PAD, the GRDP of West Bangka Regency has always experienced growth, especially in the Manufacturing Sector, namely the tin processing industry. Based on the results of the analysis, the correlation value between GRDP and PAD is negative, meaning that the relationship between the two variables is not in the same direction, thus it can be interpreted that although PAD increases, GRDP has decreased. This is due to the fact that GRDP is dominated by the manufacturing sector which has no effect on local revenue. Because the processing sector is controlled by BUMN, namely PT. Timah Tbk.

Keywords: Degree of Autonomy, Fiscal Independence, GRDP, PAD, Processing Industry

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau besar dan banyak pulau kecil. Dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia memiliki banyak jumlah pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten yang tentu saja memiliki perbedaan karakteristik ekonomi sosial dan budaya. Tercatat jumlah Propinsi ada 34 propinsi dan 514 Kabupaten yang ada di Indonesia pada Tahun 2020. Dalam hal pelaksanaan pemerintahan sejak tahun 2000 Indonesia sudah memulai babak baru penyelenggaraan pemerintah yakni pelaksanaan desentralisasi (Otonomi Daerah) di seluruh kota dan kabupaten yang ada. Salah satu hal yang berhubungan dengan otonomi daerah yaitu kemandirian fiskal suatu daerah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Menurut Suryani (2015), otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui belanja pembangunan dan investasi swasta.

Adanya otonomi daerah diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena wewenang dari pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan roda pembangunan daerahnya semakin besar. Namun, di sisi lain, otonomi daerah juga dapat menjadi beban karena dengan bertambahnya kewenangan maka semakin bertanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut. Salah satu tanggung jawab tersebut dilihat dari aspek keuangan yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Melihat kondisi keuangan daerah di seluruh Indonesia pada era otonomi sangat berbeda dengan kondisi keuangan daerah sebelum berlakunya otonomi daerah. Bentuk

dana perimbangan, khususnya dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan otonomi daerah telah mengalir dan meningkat dari tahun ke tahun dalam jumlah yang relatif besar (Mirsan et al., 2019). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karenanya, peranan PAD yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah.

Sumber pendapatan utama yang sering kali menjadi parameter untuk menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, yaitu pendapatan yang diterima yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (local source) (Rahayu, 2010). Ada dua isu utama yang terkait dengan implikasi keuangan daerah terhadap otonomi daerah ada dua isu utama yakni: a) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan tersendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, b) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin dan PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Muta'ali, 2015).

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah serta mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang bisa dijadikan pendapatan asli daerah. Berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, selama periode tahun 2010 sampai dengan 2020, rata-rata persentase dana perimbangan terhadap APBD Kabupaten Bangka Barat sebesar 72%, sedangkan rata-rata persentase PAD terhadap APBD hanya 5,9%. Berdasarkan data dari BPKAD bahwa rata-rata persentase PAD terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu 2011-2020 hanya sebesar 5,9%.

Menurut Rahman et al. (2014) Indeks Kemampuan Rutin yaitu Proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat. Belanja rutin adalah semua pengeluaran dalam bentuk belanja tidak langsung yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya (Koromath, 2015).

Kabupaten Bangka Barat mempunyai proporsi keuangan yang tidak proporsional atau masih jauh dari mandiri, tetapi diketahui rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat cukup baik yaitu sebesar 5%. PDRB Kabupaten Bangka Barat masih didominasi oleh Industri Pengolahan yaitu Industri Pengolahan Timah, dimana diketahui kalau Pulau Bangka adalah satu pulau yang hampir seluruhnya merupakan kawasan pertambangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yakni Koromath (2015) yang meneliti Kabupaten Manokwari, Badrudin (2017) di Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Mirsan et al. (2019) di Propinsi Sulawesi Selatan. Ketiga penelitian tersebut mengkaji derajat otonomi fiskal serta indeks kemampuan rutin daerah, diketahui ketiga daerah tempat penelitian masih mempunyai kemandirian fiskal yang rendah berdasarkan rasio PAD terhadap total APBD serta memiliki rata-rata Indeks Kemampuan Rutin dibawah 20% selama periode pengamatan. Penelitian ini lebih fokus pada analisis kemandirian fiskal Kabupaten Bangka Barat serta mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Barat terhadap PAD Kabupaten Bangka Barat.

STUDI LITERATUR

Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dipandang sebagai suatu strategidengan 2 (dua) tujuan penting. Pertama; bahwa pemberian otonomi harus diartikan sebagai suatu strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap dua permasalahan utama, yaitu pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah, pemerataan pendapatan dan kemandirian sistem manajemen daerah. Kedua; otonomi juga diarahkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional (Surjaningsih et al., 2012). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang sekarang diganti menjadi UU No. 23 Tahun 2014

tentang pemerintahan daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widodo (2017), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment). Menurut Rahman et al (2014) derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat. Semakin tinggi PAD, semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya), begitu pula sebaliknya. Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Selanjutnya ukuran ini dinyatakan sebagai Rasio Derajat Desentralisasi fiskal (Demora, 2016).

Derajat Otonomi Fiskal/Kemandirian Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal atau kemandirian fiskal diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total penerimaan daerah (Muta'ali, 2015). Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Koromath, 2015). Menurut Supriyadi (2013) dan Rante, Mire, & Paminto (2018), kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Kemandirian daerah berkaitan dengan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pusat. Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Dalam realisasinya, Badrudin(2017) menemukan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan untuk masing-masing daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan asli daerah (PAD)

Chigwata (2016) menyebutkan bahwa PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang. Adapun hubungan pendapatan daerah dengan beragam variabel fisik dan sosial ekonomi adalah untuk mengidentifikasi variabel mana yang mempunyai pengaruh terbanyak terhadap penerimaan pendapatan daerah. Rendahnya angka PAD dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Batik (2013) menegaskan bahwa penerimaan daerah yang terpenting banyak tergantung pada tingkat pendapatan dan perekonomian setempat yang langsung dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi nasional.

Dana Perimbangan

Menurut Muta'ali (2015) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta antarpemerintah daerah (Badrudin, 2017).

Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah dan Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa melihat apakah kenaikan PDRB tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi (Jonnadi et al., 2012). Sandi (2016) menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan teknologi. Dari beberapa faktor tersebut, modal merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Saputera, 2015).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Prastowo, 2016). Secara keseluruhan PDRB memiliki kesamaan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), bedanya PDB dalam lingkup nasional dan PDRB dalam lingkup yang lebih kecil (wilayah). Menurut AZ & Pebrina (2019) PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Terdapat dua tipe perhitungan PDRB yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam penghitungan terakhir, digunakan harga tahun 2000. Pendapatan regional atas dasar harga berlaku yang telah dikurangi dengan perkembangan inflasi dikenal dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan (Muta'ali, 2015).

Indeks Kemampuan Rutin

Indeks kemampuan rutin salah satu cara mengukur kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Asoka, 2018). Routine Ability Index is the proportion between PAD and routine expenditures. Indeks Kemampuan Rutin yaitu Proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin. Rasio Indeks Kemampuan Rutin menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Rutin, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah (Panggabean, 2017). Rasio indeks kemampuan rutin, yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat (Efendi & Wuryanti, 2011). Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya (Vurry et al., 2014a). Menurut Koromath (2015) tolak ukur kriteria Indeks Kemandirian Rutin (IKR) suatu daerah adalah:

0,00% s.d. 20,00% ; Kriteria Sangat Kurang

20.10% s.d. 40,00% ; Kriteria Kurang

40.10% s.d. 60,00% ; Kriteria Cukup

60.10% s.d. 80,00% ; Kriteria Baik

80,10% s.d. 100% ; Kriteria Sangat Baik

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah jenis penelitian kuantitatif, karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sifat objektif, mencakup pengumpulan data, dan analisis data serta melakukan pengujian statistik (Hardani et al., 2020)

Sumber Informasi

Sumber informasi/data pada penelitian ini adalah data primer yaitu berupa data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2011 sampai dengan 2020.

Teknik Analisis Data

Menurut Emalia & Budiarty (2018), Untuk menghitung derajat otonomi fiskal sebagai berikut;

$$DOF = \frac{PADt}{APBDt} \times 100\%$$

Analisis Indeks Kemampuan Rutin (IKR), untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PAD terhadap belanja rutin (Koromath, 2015);

$$IKR = \frac{PADt}{\text{Belanja Rutint}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan rumus (Horomaeng et al., 2020)

$$\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100\%$$

HASIL

Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Pertumbuhan APBD mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari suatu periode keperiode berikutnya (Muta'ali, 2015). Pertumbuhan PAD dan APBD Kabupaten Bangka Barat selama 10 tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Pertumbuhan PAD dan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2020

TAHUN	PAD (Rp)	APBD (Rp)	PERTUMBUHAN PAD	PERTUMBUHAN APBD
2020	72.519.688.000	1.079.280.015.508	0,19	0,11
2019	61.011.237.532	971.140.017.392	-0,09	0,08
2018	67.178.623.888	898.262.442.707	-0,19	0,02
2017	83.132.535.240	879.120.752.028	0,62	-0,06
2016	51.456.966.706	939.353.313.226	0,46	0,13
2015	35.233.222.900	834.211.190.192	0,11	0,07
2014	31.713.105.115	777.329.202.747	-0,27	0,11
2013	43.197.721.500	702.915.823.676	0,87	0,07
2012	23.078.015.191	654.620.168.272	-0,27	0,22
2011	31.792.985.000	534.640.206.942		

Rata-rata	50.031.410.107	827.087.313.269	0,16	0,08
-----------	----------------	-----------------	------	------

Sumber : Hasil Olahan, 2022

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Bangka Barat dalam rentan waktu 10 tahun (2011 – 2020) sebagai berikut :

Tabel 3. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2020

TAHUN	PAD (Rp)	APBD (Rp)	DOF (%)	KRITERIA UJI DOF	KATEGORI DOF
2020	72.519.688.000	1.079.280.015.508	6,72	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
2019	61.011.237.532	971.140.017.392	6,28	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
2018	67.178.623.888	898.262.442.707	7,48	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
2017	83.132.535.240	879.120.752.028	9,46	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
2016	51.456.966.706	939.353.313.226	5,48	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
2015	35.233.222.900	834.211.190.192	4,22	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
2014	31.713.105.115	777.329.202.747	4,08	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
2013	43.197.721.500	702.915.823.676	6,15	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
2012	23.078.015.191	654.620.168.272	3,53	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
2011	31.792.985.000	534.640.206.942	5,95	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
Rata-rata	50.031.410.107	827.087.313.269	5,93		

Sumber : Hasil Olahan, 2022

Indeks Kemandirian Rutin (IKR)

Indeks kemandirian rutin menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintah (Vurry et al., 2014). Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Bangka Barat dalam rentan waktu tahun 2011 – 2020 sebagai berikut :

Tabel 4. Indeks Kemandirian rutin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2020

No	Tahun	Belanja Rutin	PAD	IKR	Kriteria Uji IKR	Kategori IKR
1	2020	97.109.097.565	72.519.688.000	74,7	60,10 - 80	Baik
2	2019	107.835.400.698	61.011.237.532	56,6	40,10 - 60	Cukup
3	2018	105.193.988.700	67.178.623.888	63,9	60,10 - 80	Baik
4	2017	88.014.617.184	83.132.535.240	94,5	80,10 - 100	Cukup
5	2016	71.600.277.800	51.456.966.706	71,9	60,10 - 80	Baik
6	2015	69.891.911.050	35.233.222.900	50,4	40,10 - 60	Cukup
7	2014	81.081.526.521	31.713.105.115	39,1	20,10 - 40	Kurang
8	2013	79.289.680.450	43.197.721.500	54,5	40,10 - 60	Cukup
9	2012	81.992.139.054	23.078.015.191	28,1	20,10 - 40	Kurang
10	2011	80.147.260.619	31.792.985.000	39,7	20,10 - 40	Kurang
Rata - rata				57,3	40,10 - 60	Cukup

Sumber : Hasil Olahan, 2022

Hubungan Antara Perkembangan Ekonomi (PDRB Kabupaten Bangka Barat) Dengan Perkembangan PAD Kabupaten Bangka Barat

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa melihat apakah kenaikan PDRB tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi (Jonnadi et al., 2012). Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bangka Barat, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016 – 2020 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	4,8
2017	5,26
2018	5,2
2019	7,08
2020	-5,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

Terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pada semua sektor PDRB Kabupaten Bangka Barat. Arah korelasi dapat dilihat pada angka koefisien korelasi sebagaimana tingkat kekuatan korelasi. Besarnya nilai koefisien korelasi tersebut terletak antara +1 sampai dengan -1. Jika koefisien korelasi bernilai positif maka hubungan kedua variabel dikatakan searah serta sebaliknya. Kekuatan dan arah korelasi (hubungan) akan mempunyai arti jika hubungan antar variabel tersebut bernilai signifikan. Dikatakan ada hubungan signifikan jika nilai Sig. (2-tailed) hasil perhitungan lebih kecil dan nilai 0,05 atau 0,01. Sementara itu jika nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 atau 0,01, maka hubungan antar variabel tersebut dikatakan tidak signifikan atau tidak berarti. (Jannah et al., 2021).

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka Barat tahun 2010 – 2020, maka diperoleh hasil analisa Correlation Spearman Browman sebagai berikut :

Tabel 6. Uji Korelasi

Correlations				
			PAD	GDP
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1,000	-.855 **
		Sig. (2-tailed)	.	,002
		N	10	10
	GDP	Correlation Coefficient	-.855 **	1,000
		Sig. (2-tailed)	,002	.
		N	10	10

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil olahan, 2022

Berdasarkan tabel Correlation Spearman Brown diatas dapat diketahui bahwa adanya korelasi / hubungan negatif antara PAD dan PDRB, hal ini ditandai dengan tingginya nilai koefisien negatif spearman rank yakni -0,855. Berdasarkan tabel diatas , diketahui nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) sebesar 0,002. Karena nilai Nilai sig. (2-tailed) 0,002 < α (0,05) atau 0,01 maka dapat diartikan terdapat hubungan yang signifikan antara PAD dengan PDRB berlaku sebaliknya. Kesimpulannya terdapat hubungan signifikan yang sangat kuat dan tidak searah antara PAD dengan PDRB.

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 2. diketahui pertumbuhan PAD Kabupaten Bangka Barat mengalami 3 kali penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012, 2014, 2018 dan 2019. Sedangkan pertumbuhan APBD dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami 1 kali penurunan yaitu pada

tahun 2017. Kapasitas fiskal daerah menunjukkan tingkat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri (kemandirian) kegiatan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas fiskal atau kemandirian fiskal diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total penerimaan daerah (Muta'ali, 2015).

Tabel 3 menggambarkan derajat otonomi fiskal Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2011-2020 berdasarkan data statistic mengalami fluktuasi, perhitungannya adalah dengan menggunakan Rumus, dimana Pendapatan Asli Daerah dibagikan dengan Total Penerimaan Daerah dan dikalikan dengan 100. Secara rerata bahwakemampuan daerah Kabupaten Bangka Barat tergolong sangat rendah dengan nilai sebesar 5,93 persen selama 10 tahun. Pada tahun 2017 kemampuan keuangan daerah mencapai 9,46 persen sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 7,48 persen dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 6,28 persen kemudian tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 6,72 persen. Hal ini disebabkan tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan PAD dan berkurangnya Dana Perimbangan dari Pusat dikarenakan situasi perekonomian nasional yang sedang mengalami penurunan. Jika melihat kondisi APBD Kabupaten Bangka Barat yang masih bergantung atau masih didominasi oleh Dana Perimbangan yang rata-ratanya dalam kurun waktu 10 tahun kebelakang sebesar 72% artinya kemandirian daerah Kabupaten Bangka Barat masih merupakan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari kemandirian pemerintah daerah. Hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Bangka Barat karena jika terlalu tergantung pada dana perimbangan maka secara otomatis Pembangunan di Kabupaten Bangka Barat akan terhambat, karena wilayah Kabupaten Bangka Barat bukan merupakan Kawasan Strategis Nasional yang secara otomatis tidak menjadi prioritas pembangunan nasional dan anggaran yang dikhususkan kan pun sangat kecil.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4, diketahui rata – rata IKR Kabupaten Bangka Barat dalam rentan waktu 2010 – 2020 sebesar 57,3% atau dalam kategori Cukup. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selalu melakukan refocusing anggaran untuk menutupi defisit anggaran setiap tahunnya. Meski dalam kondisi cukup tetapi untuk anggaran rutin Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam 4 tahun terakhir selalu menghilangkan belanja pengadaan barang dan jasa pada kegiatan rutin. Dengan adanya kebijakan menghilangkan belanja pengadaan barang dan jasa secara otomatis membuat kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi terhambat, karena beberapa OPD membutuhkan beberapa peralatan untuk menunjang pekerjaan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan.

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat meningkat dari tahun 2016, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan, namun tidak besar. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan yang cukup besar, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis, penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pada semua sektor PDRB Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan tabel 6, hasil uji Correlation Spearman Brown diketahui nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,002 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,01, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara PAD dengan PDRB. Besarnya nilai koefisien korelasi pada tabel uji spearman rank bernilai negatif yaitu sebesar -0,855, yang berarti terdapat korelasi atau hubungan negatif antara PAD dan PDRB. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan yang sangat kuat dan tidak searah antara PAD dengan PDRB.

Nilai koefisiensi korelasi diatas bernilai negatif berarti hubungan kedua variabel tersebut tidak searah dengan demikian dapat diartikan bahwa meskipun PAD meningkat tetapi PDRB mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena PDRB didominasi oleh sektor industri pengolahan yang tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena Sektor pengolahan dikuasai oleh BUMN yaitu PT. Timah Tbk.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Badrudin (2017) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan

ekonomi. Artinya kenaikan PAD dapat memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya. Sedangkan, Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya dana perimbangan belum dialokasikan secara maksimal pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian oleh Mirsan et al. (2019) menyimpulkan bahwa secara simultan PDRB Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) daerah provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,5 %.

KESIMPULAN

Dari hasil serta pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Environmental leadership* memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap *actual return*. *Environmental capability* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *actual return*. Sedangkan *Firm size* memperlemah pengaruh *environmental leadership* terhadap *actual return*. Namun, *Firm size* dapat memperkuat pengaruh *environmental capability* terhadap *actual return*. Dalam praktik perusahaan, sudah seharusnya perusahaan untuk mulai berfokus pada penerapan operasi hijau. Penerapan operasi hijau tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam hal *return*. Selain penerapan operasi hijau, perusahaan juga dituntut untuk memiliki inovasi-inovasi baru untuk menunjang kinerja perusahaan yang ramah terhadap lingkungan. Hal tersebut dikarenakan akan berdampak luas untuk masyarakat sekitar jika sekiranya inovasi-inovasi tersebut merugikan masyarakat luas. Penerapan operasi hijau tidak memandang besar atau kecilnya suatu perusahaan dikarenakan penerapan dan pelaksanaannya diatur oleh pemerintah. Perusahaan memiliki masing-masing kemampuan dalam melaksanakan operasi hijau menyesuaikan dengan masing-masing jenis industri. Dapat disimpulkan juga penerapan operasi hijau belum sepenuhnya dilakukan perusahaan di Indonesia baik perusahaan dengan skala besar ataupun skala kecil. Hal ini dibuktikan ukuran perusahaan yang berhasil memoderasi *environmental capability* tetapi tidak berhasil dalam memoderasi *environmental leadership* terhadap kinerja perusahaan.

REFERENSI

- Almajali, D. A. (2021). Diagnosing the effect of green supply chain management on firm performance: An experiment study among Jordan industrial estates companies. *Uncertain Supply Chain Management*, 9(4), 897–904. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2021.7.012>
- B. DiPietro, R., Cao, Y., & Partlow, C. (2013). Green practices in upscale foodservice operations. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 25(5), 779–796. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-May-2012-0082>
- Bae, H. S. (2017). The Effect of Environmental Capabilities on Environmental Strategy and Environmental Performance of Korean Exporters for Green Supply Chain Management. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 33(3), 167–176. <https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.09.006>
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chen, Y., Chang, C., & Wu, F. (2012). Origins of green innovations: the differences between proactive and reactive green innovations. *Management Decision*, 50(3), 368–398. <https://doi.org/10.1108/00251741211216197>
- Chrisnanti, F. (2015). Perbedaan Nilai Actual Return , Expected Return , Abnormal Return , Trading Volume Activity Dan Security Return Variability Sebelum Dan Sesudah Merjer Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 17(1), 1–9.
- Darniaty, W. A., & Murwaningsari, E. (2020). Pengaruh Pengungkapan Risiko Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Moderating. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan*, 6(1), 38–45.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.

- <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Dzhengiz, T., & Niesten, E. (2020). Competences for Environmental Sustainability: A Systematic Review on the Impact of Absorptive Capacity and Capabilities. *Journal of Business Ethics*, 162(4), 881–906. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04360-z>
- Emalia, Z., & Budiarty, I. (2018). *ISSN: 2302 – 9595 Volume 7 No 1 April 2018 Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2008 Imam Awaludin Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mend.* 7(1).
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management : a stakeholder approach*. Pitman.
- Graves, L. M., Sarkis, J., & Zhu, Q. (2013). How transformational leadership and employee motivation combine to predict employee proenvironmental behaviors in China. *Journal of Environmental Psychology*, 35, 81–91. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.05.002>
- Hadjri, M. I. (2019). *Green Human Resource Management, Green Organizational Culture, and Environmental Performance: An Empirical Study*.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Pustaka Ilmu* (Issue March).
- Horomaeng, N., Rumat, V. A., Niode, A. O., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2020). Analisis Potensi Daerah Secara Sektoral Berdasarkan Pdrb Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 61–69.
- Idayanti, R., & Rianto. (2022). Analisis Tingkat Return Pembiayaan Infrastruktur Transportasi di Indonesia Dengan Sukuk Ijarah. *Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 3(1), 76–115.
- Jogiyanto, H. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE.
- Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi*.
- Kim, J. S., Kang, S. A., & Park, H. J. (2013). Impact of CEO Leadership Styles on Firm Performance during Environmental Uncertainty: A Study of Privately Owned Korean Companies. *Research Journal of Business Management*, 8(1), 43–56. <https://doi.org/10.3923/rjbm.2014.43.56>
- Kim, M., & Stepchenkova, S. (2018). Does environmental leadership affect market and eco performance? Evidence from Korean franchise firms. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 33(4), 417–428. <https://doi.org/10.1108/JBIM-02-2017-0046>
- Koromath, J. P. (2015). KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN FISKAL DAN INDEKS KEMAMPUAN RUTIN. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Papua*, 65–76.
- Kurnia, N. (2013). *Pengaruh Kinerja Perusahaan dan Risiko Sistematis terhadap Return Saham*.
- Meiryani, Olivia, Sudrajat, J., & Mat Daud, Z. (2020). The Effect of Firm's Size on Corporate Performance. *IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(5). www.idx.co.id
- Muliati, M., Iqbal, M., & Mayapada, A. G. (2020). The Effect of Organizational Culture on Firm Performance With Social Responsibility as Mediating Variable. *Research in World Economy*, 11(5), 279. <https://doi.org/10.5430/rwe.v11n5p279>
- Novitasari, M., & Agustia, D. (2021). Green supply chain management and firm performance: the mediating effect of green innovation. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 14(2), 391–403. <https://doi.org/10.3926/jiem.3384>
- Olawale, & Luqman S. (2017). The effect of firm size on performance of firms in Nigeria. *The IEB International Journal of Finance*, 15, 2–21. <https://doi.org/10.5605/IEB.15.4>
- Ongeti, W. J., & Machuki, V. N. (2018). Organizational Resources and Performance of Kenyan State Corporations. *European Scientific Journal ESJ*, 14(34). <https://doi.org/10.19044/esj.2018.v14n34p91>
- Rachmawati, S. (2019). Company Size Moderates the Effect of Real Earning Management and Accrual Earning Management on Value Relevance. *ETIKONOMI*, 18(1). <https://doi.org/10.15408/etk.v18i1.9381>

- Ringov, D. (2017). Dynamic capabilities and firm performance. *Long Range Planning*, 50(5), 653–664. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.02.005>
- Sritharan, V. (2015). Does firm size influence on firm's Profitability? Evidence from listed firms of Sri Lankan Hotels and Travels sector. In *Research Journal of Finance and Accounting* www.iiste.org ISSN (Vol. 6, Issue 6). Online. www.iiste.org
- Su, X., Xu, A., Lin, W., Chen, Y., Liu, S., & Xu, W. (2020). Environmental Leadership, Green Innovation Practices, Environmental Knowledge Learning, and Firm Performance. *SAGE Open*, 10(2), 215824402092290. <https://doi.org/10.1177/2158244020922909>
- Vu, Nguyen, Ho, & Vuong. (2019). Determinants of Vietnamese Listed Firm Performance: Competition, Wage, CEO, Firm Size, Age, and International Trade. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(2), 62. <https://doi.org/10.3390/jrfm12020062>
- Vurry, A. N., Suwendra, W., Yudiaatmaja, F., & Manajemen, J. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013. *Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, 2(1), 128–135.